



Mahkamah Agung | Ditjenbadilmiltun
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



**#bangga
melayani
bangsa** **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA AKSI TAHUN 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id



Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950





Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2026

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”

Dengan Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2026 mencatumkan program, kegiatan, target dan anggaran, sebagaimana terlampir :

RENCANA AKSI KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	75%	75%	75%	75%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%	80%	80%	80%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%	98%	98%	98%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1059.AEA Koordinasi					4 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 76.311.000,-
	001 Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 25.000.000,-
2.	1059.BCA. Perkara Hukum Perseorangan					1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-
	001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara			√		1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-

3.	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.216.000,-
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	√	√	√	√	96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.216.000,-
4.	1059.QCA Perkara yang dilayani melalui sidang diluar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara					1 Kegiatan	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 17.690.000,-
	001 – Sidang di luar gedung pengadilan				√	1 Kegiatan	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 17.690.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.70	3.70	3.70	3.70

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1059.AEA Koordinasi					4 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 76.311.000,-
	001 Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 25.000.000,-
2.	1059.BCA. Perkara Hukum Perseorangan					1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-
	001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara			√		1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-

3.	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.216.000,-
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	√	√	√	√	96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.216.000,-
4.	1059.QCA Perkara yang dilayani melalui sidang diluar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara					1 Kegiatan	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 17.690.000,-
	001 – Sidang di luar gedung pengadilan				√	1 Kegiatan	001 – Sidang di luar gedung pengadilan		Rp. 17.690.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				3.70
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	90%	90%	90%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				85%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				3.0

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung				√	4 Unit	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 20.000.000
2.	6986.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	√	√	√	√	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi , Unit	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 21.069.933.000
3.	EBD.953 Layanan Manajemen Kinerja Internal				√	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 300.000

Jakarta, 27 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002